

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan keharusan dan bagian dari komitmen bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, seperti negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi, dimana dalam setiap pengambilan keputusan selalu mengacu pada apresiasi masyarakat. Suksesnya suatu penyelenggaraan pemilu yang menjadi salah satu indikator yang dibutuhkan adalah partisipasi politik masyarakat yang berupa dapat diwujudkan dalam memberikan hak suara yang dimiliki oleh setiap masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan umum. Seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945 yang telah diamandemen Pasal 1 ayat 2, bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Berbicara tentang pemilu, pada tanggal 17 April 2019 telah diselenggarakan pemilihan umum serentak di seluruh Indonesia, dimana dalam pemilihan umum ini diselenggarakan pemilihan Anggota Legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sama halnya pemilu serentak tahun 2019 juga diselenggarakan di Jambi. Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat dan membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit

banyak dapat mempengaruhi tindakan mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat, dan mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik,

Adapun salah satu golongan yang menjadi perhatian dalam angka partisipasi ini yaitu generasi muda, contohnya mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2015 dan 2016. Mereka diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam pemilu serentak. Ikut berpartisipasi atau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu serentak memiliki ketentuan bahwa, dalam pemilihan Anggota Legislatif mahasiswa harus pulang ke tempat domisili atau daerah asal baru dapat menggunakan hak pilihnya, sedangkan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mahasiswa tanpa terkecuali dapat menggunakan hak pilihnya baik yang berdomisili di Jambi maupun yang berasal dari berbagai daerah lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa prodi PPKn Universitas Jambi angkatan 2015 pada tanggal 25 April 2019, mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak berada pada domisilinya sendiri atau dengan alasan tidak bisa pulang ke tempat domisili karena kuliah atau jarak domisili jauh. Namun hal ini bukan menjadi alasan bagi mahasiswa yang benar-benar ingin menyumbangkan suaranya atau berpartisipasi dalam pemilihan umum serentak tahun 2019.

Sesuai dengan hasil observasi pada tanggal 13 Maret 2019 lembaga KPU (Komisi Pemilihan Umum) memberikan kesempatan pada seluruh mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya dengan syarat mengurus A5 atau pindah pilih dengan membawa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan juga KK (Kartu Keluarga) agar mahasiswa dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden, lain halnya dengan pemilihan Anggota Legislatif, dalam pemilihan Anggota Legislatif harus sesuai dengan domisili yang sudah tercatat di KTP, memang pada saat pemilu serentak tersebut diliburkan secara nasional, akan tetapi tidak semua mahasiswa bisa pulang ke daerahnya masing-masing, dikarenakan mahasiswa juga banyak dari luar Provinsi atau Kota Jambi. Hal ini menjadi satu pertanyaan bagi sebagian mahasiswa dan merasa rugi juga karena tidak dapat menggunakan hak pilihnya atau tidak dapat memilih perwakilan yang akan membangun dan mensejahterakan daerah asalnya.

Pelaksanaan pemilu ini dikategorikan pada tiga kategori yaitu DPT (Daftar Pemilih Tetap) merupakan pemilih yang terdata di KPU dari data pemilih Kemendagri atau pemilu terakhir, sedangkan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) merupakan pemilih yang pindah memilih ke TPS lain dan DPK (Daftar Pemilih Khusus) merupakan pemilih yang tidak terdata dalam DPT, tapi memiliki hak pilih. Jika dilihat dari penjelasan tersebut seharusnya mahasiswa sudah mengerti dan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ikut aktif berpartisipasi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, terutama pada mahasiswa yang tidak dapat pulang ke tempat domisili, jika pada pemilihan Anggota Legislatif tidak dapat menggunakan hak pilihnya setidaknya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mahasiswa meluangkan waktunya untuk berpartisipasi.

Akan tetapi kesadaran dan tanggungjawab mahasiswa sebagai warga negara yang cinta tanah air masih rendah, karena pada saat pemerintah memberikan kesempatan kepada mahasiswa tanpa terkecuali daerahnya darimana saja bisa berpartisipasi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, namun pada kenyataannya sebagian mahasiswa yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya

atau tidak berpartisipasi dengan alasan tidak domisili Jambi atau bukan penduduk tetap Jambi, sementara lembaga KPU memberikan kesempatan mulai dari tanggal 24 Februari sampai dengan tanggal 10 April untuk mengurus surat pindah pilih. Jika dilihat dari waktu tersebut, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengurus A5 atau pindah pilih dalam jangka waktu yang lama, dan juga untuk mahasiswa yang domisilinya masih daerah Jambi seharusnya dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan anggota legislatif dengan pulang ke tempat domisili, namun mahasiswa banyak yang tidak menerapkan hasil pendidikan politik yang telah diperoleh pada partisipasi politik dan tidak tertarik dengan kegiatan politik karena merasa tidak akan berpengaruh pada mereka siapapun yang menjadi pemimpin.

Tabel 1.1 Partisipasi Politik Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Jambi Angkatan 2015 dan 2016 Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Jambi

No	Tahun Angkatan	Yang Terdaftar Sebagai DPT	Yang mengurus pindah pilih (DPTb)	Yang menggunakan KTP/ KK (DPK)	Peguna Hak Pilih			
					Anggota Legislatif (%)		Pilpres (%)	
1	2015	34	1	2	21	56,7%	23	62%
2	2016	35	-	1	21	58,3%	21	58,3%
Jumlah		69	1	3	42	57,5%	44	60,2%
		73 Mahasiswa						

Sumber: Mahasiswa PPKn Universitas Jambi

Berdasarkan tabel diatas, jumlah keseluruhan mahasiswa PPKn Universitas Jambi angkatan 2015 dan 2016 yaitu sebanyak 73 orang, akan tetapi yang berpartisipasi atau yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Anggota Legislatif sebanyak 42 orang, jika dipersentasikan sebanyak 57,5%, sedangkan yang berpartisipasi atau yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 44 orang, jika dipersentasikan sebanyak 60,2%.

Sesuai dengan data tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi politik mahasiswa PPKn masih rendah hal ini dipengaruhi rendahnya pendidikan politik mahasiswa. R. Hayer (dalam Kartono, 2009:64) mengatakan bahwa pendidikan politik merupakan usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik, dilihat dari pendapat ahli tersebut sebagian mahasiswa masih banyak yang belum menjadi partisipan yang bertanggung jawab, atau dapat dikatakan mahasiswa masih banyak yang pasif, sementara pada semester tertentu mahasiswa angkatan 2015 dan 2016 sudah diajarkan tentang apa itu politik dan bagaimana menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab dan partisipan terhadap kegiatan-kegiatan politik, hal ini tersampaikan kepada mahasiswa melalui dosen-dosen yang mengajar pada bidang mata kuliah yang bersangkutan dengan politik atau kekuasaan serta mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, dari uraian tersebut dapat dilihat data mahasiswa yang kurang memiliki kesadaran atau kurang bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Jambi Angkatan 2015 dan 2016 Yang Tidak Berpartisipasi Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Jambi

No	Tahun Angkatan	Golongan Putih (Golput)	Mahasiswa yang tidak memiliki	
			KTP	KK
1	2015	14	-	-
2	2016	15	-	-
Jumlah		29	-	-

Sumber: Mahasiswa PPKn Universitas Jambi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat mahasiswa yang tidak menggunakan hak pilihnya lebih tepatnya dikatakan golput yaitu sebanyak 29 orang, jika dipersentasikan mahasiswa Prodi PPKn Universitas Jambi angkatan 2015 dan 2016 yang golput 39,7%, dapat dikatakan kesadaran mahasiswa masih rendah. Berdasarkan data tersebut maka mahasiswa PPKn Universitas Jambi dapat

dikatakan belum sepenuhnya paham akan pendidikan politik atau belum menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik serta belum sepenuhnya menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Jika pada saat pemilu seperti ini golput atau tidak dapat menyumbangkan suaranya untuk negara bagaimana kelak generasi muda menjadi penerus bangsa dan negara, karena untuk mewujudkan kesejahteraan dimulai dari hal-hal kecil, apalagi kita tahu kesempatan seperti ini hanya terjadi 5 tahun sekali, dan satu suara mahasiswa sangat berharga dan menentukan nasib suatu negara, namun seakan mahasiswa lupa akan kewajibannya pada pesta demokrasi tersebut, saat penghitungan suara mahasiswa heboh dengan pro dan kontra terhadap paslon yang tidak sesuai dengan harapannya. Seharusnya mahasiswa sadar, jika ingin mewujudkan harapannya tentunya mahasiswa harus menggunakan hak pilihnya dengan baik dan juga tanpa perlu menyinggung atau memburuk-burukkan paslon lainnya, serta pada saat sudah selesai pelaksanaan pemilu tidak perlu berdebat masalah siapa yang akan menjadi pemimpin, karena kedaulatan tersebut berada di tangan rakyat.

Peran pendidikan politik menjadi lebih penting karena memiliki peran sebagai alat distribusi nilai kebangsaan bagi generasi muda yang memiliki posisi sangat vital dalam kehidupan kebangsaan, pendidikan politik sangat diperlukan untuk diselenggarakan. Hal ini didasarkan pada peran pemuda seperti yang dimuat dalam UU No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan yang berbunyi “pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional”. Pendidikan politik sangatlah penting bagi generasi muda agar dalam kehidupan bernegara bisa menjadi partisipan yang bertanggung jawab, sehingga bisa memahami proses penggunaan kekuasaan

dalam menegakan aturan dalam masyarakat dan masyarakat secara umum dapat menggunakan hak politiknya, maka dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Jambi Angkatan 2015 dan 2016 Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Jambi”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

- 1. Kurangnya kesadaran dan tanggungjawab mahasiswa terhadap kegiatan politik**
- 2. Mahasiswa masih banyak yang beranggapan bahwa siapapun yang menjadi pemimpin tidak akan mempengaruhi kehidupan mereka**
- 3. Mahasiswa masih banyak yang belum menerapkan pendidikan politik yang diperoleh dan masih pasif atau belum sepenuhnya paham akan pendidikan politik.**

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah dalam penelitian ini maka untuk mempermudah, peneliti membatasi masalah penelitian. Adapun yang menjadi pembatasan masalah dari penelitian ini adalah mengkaji Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Jambi Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Jambi

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah dari penelitian ini maka rumusan masalah yaitu: Adakah Pengaruh

Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Jambi Angkatan 2015 dan 2016 Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Jambi

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Jambi Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Jambi

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat diharapkan memberi manfaat bagi peneliti, akademisi dan peneliti lainnya. Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pendidikan khususnya konsep pendidikan kewarganegaraan dalam hal pengetahuan tentang pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi politik mahasiswa.

1.6.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

b) Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan penulis khususnya tentang proses pendidikan politik yang diterima mahasiswa dan diterapkan pada partisipasi politik atau kegiatan politik baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.7 Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

a. Variabel Bebas (X): Pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang berkepribadian politik, agar memiliki kesadaran politik dan mampu menjadi partisipan yang bertanggungjawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa dan negara.

b. Variabel Terikat (Y): Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.